PENGANTAR

ADMINISTRASI PUBLIK

Nasiratunnisaa Mallappiang
Muharram

Pengantar ADMINISTRASI PUBLIK

Buku Pengantar Administrasi Publik adalah sebuah panduan yang menyeluruh bagi pembaca untuk memahami dasar-dasar administrasi publik. Buku ini memberikan pengantar yang jelas dan mudah dimengerti tentang konsep-konsep utama dalam administrasi publik serta berbagai aspek yang terkait dengan pengelolaan pemerintahan. Dalam buku ini, pembaca akan diperkenalkan pada berbagai topik penting seperti definisi administrasi publik, sejarah dan perkembangannya, peran dan fungsi pemerintah, struktur dan proses administrasi, serta isu-isu terkini dalam bidang ini. Pembaca juga akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kebijakan publik diformulasikan, diimplementasikan, dan dievaluasi oleh pemerintah.

Selain itu, buku ini juga membahas peran dan tanggung jawab administrator publik dalam menjalankan tugas mereka, termasuk manajemen sumber daya manusia, keuangan publik, dan pengambilan keputusan. Pembaca akan diajak untuk memahami tantangan-tantangan yang dihadapi oleh administrator publik dalam menjalankan tugas mereka, serta strategi-strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan gaya penulisan yang jelas dan mudah dicerna, buku Pengantar Administrasi Publik sangat cocok sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa yang sedang mempelajari administrasi publik, para praktisi yang bekerja di sektor pemerintahan, atau siapa pun yang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang cara kerja pemerintah dan pengelolaan sumber daya publik.

eureka media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-120-470-7
9 786231 204707

PENGANTAR ADMINISTRASI PUBLIK

Nasiratunnisaa Mallappiang
Muharram

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

PENGANTAR ADMINISTRASI PUBLIK

Penulis : Nasiratunnisaa Mallappiang
Muharram

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Uli Mas'uliyah Indarwati

ISBN : 978-623-120-470-7

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MARET 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan sehingga penulis berhasil menyelesaikan buku dengan baik. Buku yang berjudul "Pengantar Administrasi Publik" disusun dengan harapan dapat membantu mahasiswa, dosen maupun masyarakat umum yang mencari referensi terkait administrasi publik.

Buku ini dikemas dan disusun dalam 8 bab, yaitu:

BAB 1 Pendahuluan
BAB 2 Kebijakan Publik
BAB 3 Manajemen Publik
BAB 4 Birokrasi Administrasi Publik
BAB 5 Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Administrasi Publik
BAB 6 Etika Administrasi Publik
BAB 7 E-Government dalam Administrasi Publik
BAB 8 Evaluasi Kinerja dalam Administrasi Publik

Penyusunan dan penulisan buku ini mungkin ada kekurangan yang tidak sengaja ataupun karena perkembangan ilmu pengetahuan yang belum penulis ketahui, sehingga buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu masukan dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi sempurnanya buku ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan selamat membaca.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
DAFTAR TABEL ..... **vi**
DAFTAR GAMBAR ..... **vii**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
A. Sejarah Perkembangan Administrasi Publik 1
B. Pengertian Administrasi Publik 4
C. Ruang Lingkup dan Ciri-Ciri 7
BAB 2 KEBIJAKAN PUBLIK **10**
A. Pengertian Kebijakan Publik 10
B. Urgensi Kebijakan Publik 13
C. Ciri-ciri dan Tujuan Kebijakan Publik 14
D. Model-model Kebijakan Publik 26
E. Proses Kebijakan Publik 35
BAB 3 MANAJEMEN PUBLIK **39**
A. Pengertian Manajemen Publik 39
B. Paradigma dalam Manajemen Publik 41
C. Manajemen Perencanaan 64
D. Manajemen Pelayanan Publik 77
BAB 4 BIROKRASI ADMINISTRASI PUBLIK **79**
A. Pengertian dan Karakteristik Birokrasi 79
B. Macam-macam Birokrasi 86
C. Etika Birokrasi 92
D. Pelaksanaan Birokrasi Pemerintahan Indonesia 97
E. Pengembangan Sistem Kerja 117
BAB 5 EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PUBLIK **130**
A. Pengertian Efektivitas dan Efisiensiensi 130
B. Pengukuran Efektivitas dan Efisiensi 134
C. Efektivitas dan Efisiensi dalam Pelayanan Publik 139
BAB 6 ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK **155**
A. Pengertian dan Urgensi Etika Administrasi Publik 155
B. Nilai dalam Etika Administrasi Publik 160
C. Kode Etik Administrasi Publik 167

D. Faktor Penyebab Pelanggaran Etika Administrasi Publik 171
BAB 7 E-GOVERNMENT DALAM ADMINISTRASI PUBLIK 177
A. Pengertian dan Peranan E-Goverment 177
B. Model Informasi E-Goverment 182
C. Keunggulan dan Kerugian E-Goverment Bagi Rakyat 183
D. Implementasi E-Goverment dalam Sistem Pemerintahan 184
BAB 8 EVALUASI KINERJA DALAM ADMINISTRASI PUBLIK 223
A. Pengertian Evaluasi Kinerja 223
B. Fungsi dan Sasaran Evaluasi Kenerja 233
C. Tujuan Evaluasi Kinerja 236
D. Faktor yang Mempengaruhi Evaluasi Kinerja Para Pegawai 237
DAFTAR PUSTAKA 244
TENTANG PENULIS 254

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tahap Analisis Kebijakan 36
Tabel 8. 1 Kriteria Evaluasi 226

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Proses Kebijakan Publik..... 36
Gambar 2. 1 Tahapan Kebijakan Publik..... 37
Gambar 7. 1 Sinergi ICT dan Pemerintah 198
Gambar 7. 2 E-governance, cultural change, dan good governance..... 201
Gambar 7. 3 Penyebab Kegagalan E-government menurut Heeks (2003)..... 221

PENGANTAR ADMINISTRASI PUBLIK

Nasiratunnisaa Mallappiang
Muharram

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Sejarah Perkembangan Administrasi Publik

Administrasi publik telah berkembang sepanjang sejarah dari masa ke masa sejalan dengan perkembangan peradaban dan sejarah umat manusia karena negara-negara telah membangun hubungan yang kuat antara pemerintah dan masyarakatnya. Asal usul bidang ini berasal dari masyarakat kuno, seperti Mesir dan Roma, yang pada saat itu urusan publik diatur berdasarkan kantor. Bangsa Romawi menciptakan hierarki administratif yang berbeda untuk urusan militer, peradilan, keuangan dan perpajakan, serta urusan luar negeri, yang masing-masing dijalankan oleh pejabat utama negaranya sendiri.

Sistem administrasi negara pertama kali diterapkan di negara-negara daratan Eropa, karena pada saat itu Negara Eropa merupakan negara Kerajaan. Selanjutnya, negara yang menggunakan sistem administrasi negara adalah Perusia dan Austria. Di negara ini sistem administrasi negara yang digunakan sangat kental. Perancis saat itu juga menganut sistem administrasi seperti Eropa yang menggunakan sistem kameralisme pada abad ke-18. Dalam sistem kameralisme inilah awal mulanya administrasi negara mencapai efesiensi manajemen. Dalam pencapaian efesiensi manajemen tersebut administrasi negara dianggap membutuhkan tenaga dan sarjana ahli, maka dibangunlah sekolah nasional dan profesional di negara yang menggunakan sistem kameralisme.

BAB 2

KEBIJAKAN PUBLIK

A. Pengertian Kebijakan Publik

Ruang lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Kebijakan publik atau *public policy* adalah istilah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan-kegiatan akademis, seperti dalam kuliah-kuliah ilmu administrasi, ilmu hukum, dan ilmu politik. Oleh karena itu, istilah kebijakan publik dapat dikatakan bukan hal yang baru dalam tataran dunia akademisi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Adapun beberapa defenisi kebijakan publik yang disampaikan oleh para ahli dengan pendekatan dan batasan kebijakan publik yang ditawarkan sebagai berikut.

BAB 3

MANAJEMEN PUBLIK

A. Pengertian Manajemen Publik

Manajemen publik merupakan cabang keilmuan dari administrasi publik yang membahas mengenai restrukturisasi organisasi, sistem penganggaran, manajemen sumberdaya, dan evaluasi program. Konsep manajemen publik sangat bergantung pada situasi dan kondisi lingkungan yang ada sehingga dapat berfungsi dengan baik. Dalam buku ini dijelaskan juga mengenai teori-teori utama dalam manajemen publik, diantaranya Teori kelembagaan baru (New Institusionalism Theory), Teori Pilihan Publik (Publik Choice Theory) dan Principal Agent Theory. Pada teori manajemen, terdapat konsep manajemen tradisional dan kontemporer pada sektor publik yang kemudian diaplikasikan pada fungsi utama manajemen yaitu PODSCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting).

Secara umum, manajemen publik atau manajemen pemerintah merupakan suatu upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Unsur manajemen saat ini menjadi suatu unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik organisasi pada sektor swasta maupun dalam sektor publik, seperti organisasi pemerintahan. Manajemen sektor publik yang diangkat dari manajemen sektor swasta tidak menjadikan orientasi tujuan dan pelaksanaan pada organisasi sektor publik menjadi sama dengan sektor swasta. Mahmudi (2010:38-40)

BAB 4

BIROKRASI ADMINISTRASI PUBLIK

A. Pengertian dan Karakteristik Birokrasi

Institusi birokrasi merupakan ruang mesin suatu negara yang di dalamnya berisi orang-orang yang digaji dan dipekerjakan oleh negara untuk memberikan nasehat dan melaksanakan kebijakan politik negara. Sekalipun secara teoritis pengertian birokrasi dapat dipahami secara sederhana sebagai aparatur negara, namun secara praktis pengertian birokrasi masih sering menimbulkan kontroversi pada konsepsi yang paling luas. Birokrasi sering disebut sebagai badan/sektor pemerintah atau dalam konsepsi bahasa Inggris disebut public sector, atau juga public service atau public administration. Konsepsi itu mencakup institusi atau orang yang penghasilannya berasal secara langsung atau tidak langsung dari uang negara atau rakyat yang biasanya tercantum dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Akan tetapi di banyak negara, ada beberapa kelompok bidang profesi seperti guru, pegawai BUMN, angkatan bersenjata, yang walaupun penghasilannya berasal dari uang negara, namun tidak dimasukkan sebagai bagian dari badan pemerintah atau public sector. Dibandingkan dengan subyek ilmu pengetahuan yang lain, sesungguhnya eksistensi birokrasi baik sebagai fenomena politik administrasi maupun sebagai subyek ilmu pengetahuan dapat dikatakan masih relatif baru. Keberadaan birokrasi secara institusional muncul setelah manusia mulai mengenal bentuk negara modern. Sebagai obyek kajian ilmu pengetahuan, kajian

BAB 5

EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PUBLIK

A. Pengertian Efektivitas dan Efisiensiensi

Efektivitas dan efisiensi merupakan dua konsep penting dalam bidang administrasi publik. Kata efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi, karena keduanya memilki arti yang berbeda sekalipun dalam berbagi pengunaan kata efisiensi digandengkan dengan kata efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan.

Secara etimologis,efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya memiliki efek, pengaruh, atau akibat. Konsep keefektifan digunakan untuk merujuk kepada derajat pencapaian tujuan dari suatu aktivitas. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan. Efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris, yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata efek dan istilah ini digunakan sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan (Harbani Pasolong, 2007:4). Pelayanan masyarakat dapat dikategorikan efektif apabila masyarakat memperoleh kemudahan pelayanan dengan

BAB 6

ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK

A. Pengertian dan Urgensi Etika Administrasi Publik

Dalam ensiklopedi Indonesia etika sebagai ilmu kesusilaan yang menentukan bagaimana sepatutnya manusia hidup dalam masyaraka, apa yang baik dan apa yang buruk. Secara etimologis, etika berasal dari kata ethos (bahasa Yunani) yang berarti kebiasaan atau watak. Etika menurut bahasa Sansekerta lebih berorientasi pada dasar-dasar, prinsip, aturan hidup yang lebih baik. Etika menurut Bertens (dalam Pasolong, 2007: 190) adalah kebiasaan, adat atau akhlak dan watak. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah etika selalu berhubungan dengan kebiasaan atau watak manusia (sebagai individu atau dalam kedudukan tertentu), baik kebiasaan atau watak yang baik maupun kebiasaan atau watak buruk. Watak baik yang termanifestasikan dalam kelakuan baik, sering dikatakan sebagai sesuatu yang patut atau sepatutnya, sedangkan watak buruk yang termanifestasikan dalam kelakuan buruk, sering dikatakan sebagai sesuatu yang tidak patut atau tidak sepatutnya. Dalam lingkup pelayanan publik, etika administrasi publik (Pasolong, 2007: 193) diartikan sebagai filsafat dan profesional standar (kode etik) atau right rules of conduct (aturan berperilaku yang benar) yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik atau administrasi publik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa etika administrasi publik adalah aturan atau standar pengelolaan, arahan moral bagi anggota organisasi atau pekerjaan manajemen; aturan atau standar pengelolaan yang merupakan

BAB 7

E-GOVERNMENT DALAM ADMINISTRASI PUBLIK

A. Pengertian dan Peranan E-Goverment

Inovasi data dan korespondensi (ICT) atau Data *Correspondence Innovation* (ICT), khususnya web mengubah cara hidup individu di era industry 4.0 dan era socity 5.0. Meskipun demikian, tidak ada bagian dari keberadaan manusia yang jauh dari TIK, khususnya web. (Kurnia et al., 2018) Kemajuan inovasi data diterapkan sebagai administrasi dengan tujuan agar masyarakat umum dapat mengetahui dan mengatur penyajian otoritas publik untuk mengakui administrasi yang hebat. Salah satu jenis organisasi pemerintahan dengan memanfaatkan kerangka kerja administrasi berbasis inovasi yang terkenal dengan sebutan E-Government. E-Government adalah jenis aplikasi administrasi yang dapat bekerja pada sifat administrasi publik yang bergantung pada inovasi dan korespondensi untuk menjawab permintaan dan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan penanganan informasi yang cepat dan data yang tepat. E-Government diharapkan dapat lebih mengembangkan produktivitas, kecukupan, keterusterangan, dan tanggung jawab organisasi pemerintah yang bertekad untuk membangun kepercayaan publik terhadap gambaran organisasi yang didukung pembayar pajak, khususnya administrasi. Manfaat web sangat besar, terutama dalam bidang bisnis, hiburan, dan pemerintahan kota.

E-Government merupakan singkatan dari elektronik Government atau elektronik pemerintah. E-Governtment biasa dikenal sebagai e-gov, pemerintah digital, online pemerintah,

BAB 8

EVALUASI KINERJA DALAM ADMINISTRASI PUBLIK

A. Pengertian Evaluasi Kinerja

Evaluasi dapat disamakan dengan istilah penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assesment). Evaluasi kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, tetapi meliputi apakah uang tersebut dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. William N. Dunn, mengatakan bahwa evaluasi adalah usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkaitan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (Dunn, 2003:608). Evaluasi merupakan suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana tindak lanjut atas perbedaan itu. Jadi tampak jelas bahwa untuk melakukan evaluasihasil, dan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan sebuah program atau proyek. Penilaian terhadap kinerja sebuah program atau proyek ini hendaknya dilakukan secara partisipatif oleh kelompok yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau proyek tersebut dibutuhkan tolak ukur tertentu sebagai acuan, seperti misalnya yang terdapat dalam suatu program kerja. Program kinerja ini pada gilirannya akan dilaksanakan dan di evaluasi. Evaluasi adalah memberikan

DAFTAR PUSTAKA

Abdal. 2015. Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik). Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati.

Affrian, R. 2012. Kebijakan Publik by Eko Handoyo (z-lib. org). Semarang: Widya Karya, 323.

Afri Awang, San. 2008. Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMHD). France: CIRAD.

Agung, Kurniawan. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Pembaruan, Yogyakarta.

Agus Sunyoto (1999). Kualitas Kinerja Aparatur. Yogyakarta: Kanisius.

Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta

Albrow, Martin, Birokrasi. 1996, Terj. M. Rusli Karim. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Ali Faried, Alam Andi Syamsu. 2012. Studi Kebijakan Pemerintah. Bandung: PT. Refika Aditama

Amirullah, 2011. Pengantar Manajemen. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Graha Ilmu

Aniwati, 2014, Evaluasi Kinerja Pegawai dalam Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan

Aniwati. 2014. Evaluasi Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Busang Sangatta Kabupaten Kutai Timur. eJournal Administrasi Negara. Vol. 2. No. 4. 1852-1865.

Anwar Prabu Mangkunegara. 2005. EvaluasiKinerja. Refika Aditya, Bandung.

Awang Sang Afri, 2008, Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan.

Azhari, Idham Ibty dkk. 2002. Good Governance dan Otonomi Daerah, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Beetham, David. 1987. Democracy and Human Rights. UK: Polity Press.

Blau, P. M. & Page, C. H. 1956. Bureaucracy in Modern Society. Random House, New York.

Budi, Winarno. 2002. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Presindo, 2002,hal. 14 - 15.

Budi, Winarno. 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan studi kasus. Yogyakarta: CAPS.

Campo, Salvatore Schiavo and Sundaram, Paschampet. 2002. To Serve and To Preserve: Improving Public Administration in A Competitive World. Asean Development Bank. E-governancein Depth.

Danim, Sudarwan. (2000). *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Darma, 2009. Sistem Biometrika : Konsep Dasar Teknik Analisis Citra. Andi Publisher.

Darwin, Muhadjir. 1995. Dalam Demokrasi Indonesia Kontemporer. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Darwin, Muhadjir., 1998. Implementasi Kebijakan. Modul Kursus TMPP MAPUGM, Yogjakarta.

Denhardt, J.V., dan Denhardt, R.B., 2003. The New Public Service, M.E. Sharpe, New York.

Denhardt, Janet V. and Denhardt, Robert B., 2007. The New Public Service, Serving Not Steering, Expanded Edition, Armonk, New York, London, England: M. E. Sharpe.

Denhardt, R.B. & J.V. Denhardt, 2000. "The New Public Service", dalam PublicAdministration Review, Vol 60, No. 6.

Dharma, Surya. 2009. Manajemen Kinerja Falsafah Teori dan .Penerapannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dirk Malaga Kusuma, 2013, Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Badan.

Djunaedi, Ahmad. *Beberapa Pemikiran Penerapan e-Governmat dalam pemerintahan daerah di Indonesia*, Yogyakarta, 2002.

Douglas, Paul H. 1953. Ethics in Goverment. Harvard University Press. Massachusetts.

Dror, Yehezkel . 1968. Public Policy Making, Reexamined. Seraton, PA: Chandler

Dunn, W. N. 1994. Public Policy Analysis: An Introduction, New Jersey: Pearson Education. Dalam Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Dunn, William. N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press

Dwijowijoto, R. N. 2004. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Edwin, Flippo. 1983. Administrative Responsibility dalam Felix A.

Fitri Meutia, I. F., 2017. Reformasi Administrasi Publik, Bandar Lampung: Aura.

Gibson, James L. et al. 1996. Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses. Diterjemahkan oleh Ninuk Adriani. Jakarta: Binarupa Aksara.

Gladden, EN. 1972. Public Administration and History.First Published December 1, 1972. Research Article https://doi.-org/10.1177/002085237203800402.

Haque, R, Harrop, dan S. Breslin, 1998. Comparative Government and Politics, Mac MillanPress, London

Hayat. 2017. Manajemen Pelayanan Publik. Depok: PT.Raja Grafindo Persada

Heady, F. 1984. Public Administration: A Comparative Perspective. New York: Heady Marcel Dekker Inc.

Heeks, Richard. 2003. Most e-government for Development Project Fail: How Can Risk be Reduced?. iGovernment Working Paper Series. Manchester: Institute for Development Policy and Management.

Herjuliani, 2017, Analisis Kerja Pegawai pada Kantor Kelurahan Melayu Kota Piring.

Heywood, Andrew, 2004. Political Theory: an Introduction, New York: Palgrave Macmillan.

Ibrahim, A. 2008. Teori dan Konsep Pelayanan Publik dan Implemantasinya. Jakarta: Mandar Maju.

Indrajit, Richardus Eko. 2004. Electronic Government (Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital). Yogyakarta: .ANDI.

Islamy, M. Irfan. 2009. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Ismani, H. P. 2001. Etika Birokrasi. Jurnal Administrasi Negara Volume II Nomor 1.

Ivancevich, John. 2007. Perilaku & Manajemen Organisasi. Jakarta: Erlangga

Jaques, Elliot, 1976. A General Theory of Bureaucracy, Holsted Press, New York.

John M. Ivancevich, 2006, Perilaku dan Manajemen Organisasi, Jakarta: Erlangga.

Juliantara, D. 2005. Peningkatan Kualitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan

Juliantara, Dadang (ed). 2005. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan.

Kartasasmita, Ginandjar. 1997. Administrasi Pembangunan: Perkembangan, Pemikiran, dan Praktiknya di Indonesia.Jakarta: LP3ES.

Keban,Yeremias T, 2008, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu, Yogyakarta, Gava Media.

Keban,Yeremias T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Gava Media. Yogyakarta.

Keban,Yeremias T. 2005. Etika Pelayanan Publik : Pergeseran paradigm, dilemma dan Implikasinya bagi Pelayanan Publik di Indonesia. FISIPOL. Universitas Gadjah Mada.

Khristianto, Wheny. 2007. Hambatan dan Potensi Penerapan E-Government. *Jurnal ADMINISTRATIO*. Vol. 1, No. 2.

Krieken, R.V. et. al, 2000. Sociology: Themes and Perpectives, Longmann, French Forest.

Kumorotomo, Wahyudi. 1992. Etika Administrasi negara. Jakarta: Rajawali Press.

Kurnia, T. S., Rauta, U., & Siswanto, A. (2018). E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 46 (2), 170. https://doi.org/ 10.14710/mmh.46.2.2017.17 0-181

Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi pelayanan publik. pembaruan. Yogyakarta.

Kusuma, Dirk Malaga. 2013, Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 1. No. 4.

Lukman, Sampara, 2004. Manajemen Kualitas Pelayanan. Jakarta:

Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Kedua. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Mangkunegara, Anwar Prabu. 2005. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Bandung: Rafiak Aditama.

Moenir, H.A.S. 2006. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.

Moon, M. J. 2002. The Evolution of E-Government among Municipalities: Rhetoric or Reality? Public Administration Review, 62(4), 424–433. https://doi.org/10.1111/0033-3352.00196.

Mughni, Abdul. 2016. Aplikasi E-Government Menuju Good Governance. https://panel.sulselprov.go.id/post/aplikasi-e- government-menuju-good-governance.

Muhaimin, Yahya, 1990, Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru. Ramadhani: Solo.

Muhajir, Haedar Akib, Risma Niswaty. 2022. Organizational Transformation at Regional General Hospital of Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu, Bantaeng Regency. *Baltic Journal Of Law & Politics A Journal of Vytautas Magnus University*. Vol. 15, No. 2. p. 1947-1968.

Mukarom, Zaenal dan Muhibudin Wijaya Laksana. 2015. Manajemen Pelayanan Publik. Bandung: Pustaka Setia.

Muluk, M.R. dan Khairul. 2001. Lokalisasi dan Globalisasi: Tantangan dan Peluang Digitalisasi Pemerintah Daerah, Bisnis dan Birokrasi. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Vol. IX (2).

Ndraha, Taliziduhu. (1989). Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia. Jakarta: Bina Aksara

Nugroho, Riant. 2008.Public Polic . Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

Nugroho, S. 2007. Political Environment dalam Implementasi Electronic Government . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Pasolong, Harbani, 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.

Pasolong, Harbani. 2007. Kepemimpinan Birokrasi. Bandung: Alfabeta

Pierre,J dan Peters, G.B. (2000). Governance,Politics and The State. New York: MacMillan Press.

Poedjawijatna. 1986. Etika: Filsafat Tingkah Laku. Jakarta: Bina Aksara

Pratikno. 2005. Good Goaernance dan Gouernability. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 8, No. 3. Hal. 231 – 248.

Riley, M., Ladkin, A., & Szivas, E. 2002. Tourism employment: Analysis and planning (Vol. 6): Channel View Publications.

Ripley, R.B. (1985) Policy analysis in political science, Chicago: Nelson-Hall.

Robbins, Stephen P., 1994. Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi, Alih Bahasa Jusuf Udaya, Jakarta, Arcan

Shah, Anwar dan Sana Shah, 2006. The New Vision of Local Governance and the Evolving Roles of Local Governments. Dalam Tata Kelola Lokal di Negara Berkembang, ed. Anwar Shah, 1–46 (Washington: Bank Dunia, 2006), 1–46.

Sharkansky, I. 1975. Public Administration : Policy-Making in Government Agencies. Third Edition. Chicago: College Publishing Company.

Siagian, Sondang P., 2003.Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi dan Strateginya, Jakarta: Bumi Aksara.

Simanjuntak. 2005. Manajemen Dan Evaluasi Kinerja. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Steer, Richard. M. 1985. Efektivitas Organisasi. cetakan II. Jakarta: Erlangga.

Steinberg, Sheldon.S dan Austern, David T. 1999. Government, Ethics And Managers : Penyelewengan Aparat Pemerintahan, Bandung: Remaja Rosda Karya.

STIA-LAN Press,

Suharno. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: UNY Press.

Suharyana, Yana. 2017. Implementasi E-Government Untuk Pelayanan Publik Di Provinsi Banten. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*. Vol. 1. No 1. 45– 58

Suharyanto, Hadriyanus. 2005. Anggaran Berbasis Kinerja Konsep dan Aplikasinya (Konsep Anggaran Kinerja), Magister Administrasi Publik UGM dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) 2005.

Suyamto. 1989. Norma Dan Etika Pengawasan. Jakarta: Sinar Grafika.

Syafii, Inu Kencana. 2004. Birokrasi Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Mandar Maju.

Tangkilisan, 2003. Kebijakan Publik yang Membumi, Jakarta: Indeks.

Taufiq. Otong Husni, Dini Yuliani, dan Dadan Hermawandi. 1987. Tata Kelola Pemerintah Desa Berbasis E-Government Menuju Good Governance. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/viewFile/1987/1603

Tayyib, Muhammad. 2015. Kualitas Pelayanan Paspor Di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar. Skripsi Program Studi Administrasi Negara Unhas.

Thoha, M., 2005. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Thoha, M., 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Thoha, Miftah dan Dharma, Agus (editor), 1999. Menyoal Birokrasi Publik, Jakarta: Balai Pustaka.

Tjiptono, Fandi. 1996. Manajemen Jasa, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 2000. Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan). LAN RI: Jakarta.

Turner, Mark dan David Hulme. 1997. Governance, Adminittation, and Development. London: MacMillan Press.

Wahab, S. A. 2021. Analisis kebijaksanaan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijaksanaan Publik.Jakarta: Bumi Aksara.

Wahyunengseh, R. D., Rima Vien Permata Hartanto, dan Sri Hastjarjo. 2012. Public Governance: Pemerintah dan Masyarakat Saling Menguatkan dalam Kepedulian dan Sinergitas. Surakarta: UNS Press.

Weber, Max. 1979. Economy And Society : An Of Interpretive Sociology, And Power, Mc-Graw Hill Book Company Limited, London.

Weiss, TG. 2000. Governance, good governance, and global governance: conceptual and actual challenges. Third World Quarterly 21 (5): 795–814.

Widodo, Joko. 2001. Good Governance: Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah. Surabaya: Insan Cendekia.

Wijaya, Stefanus Wisnu. 2006. Kajian Teoritis: Model E-Government Readiness Pemerintah Kabupaten/Kotamadya dan Keberhasilan E-Government. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2006 (SNATI 2006) ISBN: 979-756- 061-6 Yogyakarta.

Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.

Wirawan. 2009. Evaluasi Kerja Sumber Daya Manusia. Jakarta: Salemba Empat.

Yukl, Gary, 2015. Kepemimpinan dalam Organisasi. Edisi Ketujuh. Indeks. Jakarta.

Zahnd, Markus. 2006. Perancangan Kota Secara Terpadu. Yogyakarta: Kanisius

TENTANG PENULIS

Nasiratunnisaa Mallappiang lahir di Ujung pandang, 6 Oktober 1984. Sarjana pada tahun 2007 di Universitas Fajar Makassar, Magister di Universitas Negeri Makassar pada tahun 2020, dan Doktor dalam Ilmu Administrasi Publik di Universitas Negeri Makassar pada tahun 2023. Diangkat sebagai dosen tetap di Universitas Pancasakti sejak tahun 2021 sampai sekarang. Nasiratunnisaa Mallappiang telah menulis Buku dan jurnal, yaitu: (1) The Urgency Of Publik Communication Ethics In The Era Of Cyber Society, 2022, *Sinomics Journal*, Vol. 1. No. 5. (2) Policy Implementaation of Luwu Regional Library Develoment Policy, 2022, *Pinisi Discretion Review*, Vol. 5, Issue 2. (3) Challenges Of Social Sciences Education and Technology For Achieving Sustainable Develoment, 2022. (4) Keberadaan Humas Dalam Menunjang Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Indonesia Timur Makassar, 2021, Jornal Governance and Politics (JGP). Vol. 1, No. 2. (5) Pengantar Manajemen Pelayanan Publik. Buku: Medan: Yayasan Kita Menulis. 2023. (6) Dasar-dasar Public Relation. Buku, Purbalingga: Eureka Media Aksara. 2023. (7) Communication Techniques for Persuasion of Students and Lecturers in Shaping Behavior. 2023. SITEKIN: Journal Sains, Teknologi dan Industri. Vol. 20. No. 2. (8) Accountability of Building Approval Services in Gowa District. 2023. Journal of Humanities and Social Sciences Studies. Vol. 5. No. 10. (9) Strategies For Accountability Of Building Approval Services In Gowa Regency. 2023. IOSR Journal Of Humanities And Social Science Vol. 28. No. 9.

Muharram lahir di Pinrang, 7 Mei 1961, Guru Besar dalam bidang Kimia Organik di Universitas Negeri Makassar. Sarjana Pendidikan Kimia di IKIP Ujungpandang tahun 1987. Magister Sains pada bidang Kimia Organik pada tahun 1993 di ITB Bandung. Doktor dalam bidang Kimia Organik diperoleh pada tahun 2004 di Universitaet Otto von Guericke Magderburg Jerman. Publikasi Ilmiah: (1) Efficient Synthesis of Optically Active R- and S-2-Phenylpropanal. *PublScie-AEIF of Journal*; (2) Stereoselektivitas Reaksi Aldol dalam Sintesis C1-C12 Senyawa Epotilon. *J. Matematika & Sains*; (3) Sintesis (S)-3-asetil-4-isopropil-5,5-difenil-oxazolidin-2-on: Senyawa Auxiliari Efektif untuk Reaksi Aldol yang Selektif. *J. Chemica*; (4) Senyawa Metabolit Sekunder Anti Bakteri dari Tumbuhan *Lantara Camara* Linn (Verbanaceae). *Prosiding*. UNM Makassar; (5) The Antibacterial Properties of Bayur Tissues' Extract (Pterospermum subpeltatum C. B. Rob). *J. Telknologi*; (6) Screening of Tembelekang Plant (Lantana Active Compound for Prevention of infections. Proceeding ICMSTEA Makassar UNM. (7) Communication Techniques for Persuasion of Students and Lecturers in Shaping Behavior. SITEKIN: Journal Sains, Teknologi dan Industri. Vol. 20. No. 2. Buku: (1) Senyawa Steroid dan Terpenoid. Makassar: CV Sahabat Hard. 2023. (2) Dasar-dasar Public Relation. Purbalingga: Eureka Media Aksara. 2023. Partisipasi pada Pertemuan Ilmiah: (1) Seminar Internasional sebagai penyaji makalah dengan judul "Isolation and Characterisation of Neutral Compounds from *Artocarpus teysmanii* Miq.:An Original Plant of South Sulawesi Rainforest", di Manchester Inggeris; (3) Seminar Internasional sebagai penyaji dengan judul "Isolation and Identification of *β*-Sitosterole Constituent from *n*-Hexane Extract of *Artocarpus teysmanii* Miq"di Makassar.